

DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg Ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia*, Cet. I, PT Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Kurnia, Anwar, Moh. Suryana, *Kronik Sejarah*, Yudhistira, Bogor, 2004.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VII, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. I, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VII, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Weda, Made Darma, "Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Muladi, "Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat Di Era Demokrasi", *Makalah*, Jakarta, 2000.
- Hadjon, Philipus Mandiri, "Discretionary Power dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", *Makalah*, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, Jakarta, Balai Pustaka 1989.

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PUTUSAN :

Rome Statute of The International Criminal Court 1998

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 oktober 2002, menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 013/PUU-I/2003

SITUS INTERNET :

<http://www.indomedia.com/bernas/2009/02/UTAMA/02uta1.htm>

<http://www.elsam.or.id/kkr/tanjung%20priok.html>